

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XVIII		URUSAN PERHUBUNGAN 1. KEBIJAKAN Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan berbentuk NSPK 2. PERHUBUNGAN DARAT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Jaringan Transportasi Jalan a Jaringan Prasarana dan Pelayanan - penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang - penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C - penetapan lokasi terminal barang utama - standar pelayanan minimal pengoperasional terminal - Jaringan trayek angkutan antar kota - Jaringan lintas pada jaringan jalan primer - Penetapan kelas jalan primer - Kualifikasi teknis petugas terminal - Jaringan transportasi jalan sekunder b Pengembangan Transportasi Jalan - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan 2. Sarana Angkutan Jalan a. Pengujian Kendaraan Bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor <p>b. Teknologi Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor <p>3. Lalu Lintas Jalan</p> <p>a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional <p>b. Perlengkapan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman teknis perlengkapan jalan - Penimbangan kendaraan bermotor di jalan - akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor - kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional <p>4. Angkutan Jalan</p> <p>a. Angkutan Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi - izin trayek antar kota antar kabupaten - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas antar kota/kabupaten - penilaian kinerja perusahaan angkutan umum - pemberian subsidi angkutan umum - angkutan perintis - penghargaan perusahaan angkutan umum <p>b. Angkutan Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan angkutan barang <p>5. Pengendalian Operasional</p> <p>a. Monitoring Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan <p>b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman teknis - Penyidik Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) <p>Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>1. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Analisa dan Evaluasi Jaringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan - analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan <p>b. Pengembangan Jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) - pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>a. Rancang Bangun Sarana</p> <p>b. Bimbingan Perawatan Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan - pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau-danau penyeberangan <p>3. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Rancang Bangun Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan - rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan <p>b. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan <p>4. Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Manajemen Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Lalu Lintas - tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau - sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau <p>b. Alur dan Perambuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan - penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau - perambuan sungai, danau dan penyeberangan <p>5. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Bimbingan Usaha Angkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan - persetujuan operasi kapal penyeberangan dilintas nasional dan internasional <p>b. Tarif dan keperintisan</p> <ul style="list-style-type: none"> - perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan - kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan <p>Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>1. Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <p>a. Jaringan Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - transportasi perkotaan yang berbasis jalan dan perairan darat - transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi kabupaten - sistem informasi manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Lalu Lintas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan - penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah <p>3. Angkutan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek - jaringan trayek perkotaan - penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi kabupaten <p>4. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang b. pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi kabupaten <p>5. Dampak Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan b. Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan c. masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan d. pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3. Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum</p> <p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum</p> <p>- Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>4. Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a. Audit Keselamatan</p> <p>- Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>- Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>- Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>b. Inspeksi Keselamatan</p> <p>- Pedoman Keselamatan</p> <p>- Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>- Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>PERHUBUNGAN LAUT Lalu Lintas dan Angkutan Laut</p> <p>1. Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>a. Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner</p> <p>- jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing b. Tramper dan Pelayanan Rakyat <ul style="list-style-type: none"> - trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri - usaha pelayaran rakyat <p>2. Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</p> <p>a. Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar muat - persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan indonesia <p>b. Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan dan perikanan - persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan indonesia serta penunjang angkutan laut <p>3. Pengembangan Usaha Angkutan laut</p> <p>a. Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan armada - analisis ekonomi kebutuhan armada <p>b. Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut - perizinann penyelenggaraan usaha pelayaran - izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda <p>4. Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut</p>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut <ul style="list-style-type: none"> - rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu - angkutan bahan pokok b. Evaluasi Angkutan Laut <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu - angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut <p>Pelabuhan dan Pengerukan</p> <p>1. Pengembangan Pelabuhan</p> <p>a. Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tatanan kepelabuhan - pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan - persetujuan penetapan lokasi pelabuhan - penyusunan laporan <p>b. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - rencana induk dan pengembangan pelabuhan <p>2. Perancangan Fasilitas Pelabuhan</p> <p>a. Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan - survei topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik - persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan <p>b. Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan - sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan 					
		<p>3. Pengerukan dan Reklamasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi <ul style="list-style-type: none"> - perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi b. Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi <ul style="list-style-type: none"> - perizinan - penggunaan kapal dan alat bantu keruk - pekerjaan pengerukan dan reklamasi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>4. Pemanduan dan Penundaan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perairan dan Pelayanan Pandu <ul style="list-style-type: none"> - penetapan wilayah perairan pandu - standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal b. Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan <ul style="list-style-type: none"> - kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu - standardisasi sarana bantu pemanduan 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>5. Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - tarif jasa kepelabuhan - kinerja pelayanan pelabuhan b. Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan <ul style="list-style-type: none"> - penetapan batas daerah lingkungan kerja - penggunaan atas tanah dan perairan - kerjasama kepelabuhan - persetujuan pengoperasian pelabuhan <p>Perkapalan dan Kelautan</p> <p>1. Kelaikan Kapal</p> <p>a. Konstruksi dan Stabilitas Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas <p>b. Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengesahan gambar dan rancang bangun - pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana <p>2. Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal</p> <p>a. Pengukuran Kapal</p> <p>b. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal</p> <p>c. Pendaftaran, baliknama, dan hipotek kapal</p> <p>d. Penyelenggaraan penggantian bendera kapal</p> <p>e. pemberian surat tanda kebangsaan kapal</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>f. pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal</p> <p>3. Nautis, Teknis dan Radio Kapal</p> <p>a. Penilikan Keselamatan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - teknis permesinan kapal - elektronika dan radio kapal - perlengkapan dan peralatan kapal <p>b. Sertifikasi Keselamatan Kapal</p> <p>4. Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal</p> <p>a. Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal - pemantauan peralatan pencemaran - ganti rugi pencemaran - pembersihan tangki-tangki kapal - sarana pengangkutan dan penampungan limbah di pelabuhan - sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan <p>b. Manajemen Keselamatan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - manajemen keselamatan pengoperasian kapal - sertifikasi manajemen keselamatan kapal 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>5. Kepelautan</p> <p>a. Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut - perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal <p>b. Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengukuhan sertifikat - database sertifikat laut - pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan <p>Kenavigasian</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>1. Perambuan</p> <p>a. Operasi dan Survei</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran - pengamatan laut dan survei alur pelayaran - penandaan daerah terbatas dan terlarang - daerah ship to ship - maklumat pelayaran bahaya navigasi - design sistem rute dan tata cara berlalu lintas <p>b. Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - peralatan - perencanaan pembangunan - replacement 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan dan pemeliharaan - gambar design konstruksi - kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut 					
		<p>2. Telekomunikasi Pelayaran</p> <p>a. Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan kinerja stasiun radio pantai - stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika - pemberian rekomendasi ijin radio telekomunikasi pelayaran - ijin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran - ijin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran <p>b. Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan bangunan gedung - sistem jaringan - peralatan dan suku cadang - pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran - penilaian teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	Unit Pengolah Terkait
		<p>3. Kapal Negara Kenavigasian</p>	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3. Tertib Pelayaran</p> <p>a. Kebandaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengawasan penanganan muatan berbahaya - tertib lalu lintas kapal dan tertib bandar - izin berlayar - pengawasan kapal asing - penetapan kualifikasi teknis petugas kesyahbandaran - pengawasan penanganan muatan berbahaya <p>b. Kecelakaan Kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengusutan kecelakaan dan bencana kapal - pengajuan pemeriksaan lanjutan perkara - pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan - penetapan kualifikasi teknis petugas penanganan pemrosesan kecelakaan kapal 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<p>4. Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air</p> <p>a. Penanggulangan Musibah</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>search and rescue</i> - penanggulangan pencemaran - tuntutan ganti kerugian pencemaran dan pemadaman kebakaran - penetapan kualifikasi teknis petugas <i>search and rescue</i>, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran <p>b. Pekerjaan Bawah Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendirian perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan - kegiatan penyelaman - penanganan kerangka kapal dan salvage - penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<p>5. Sarana dan Prasarana</p> <p>a. Sarana dan Prasarana Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none">- pemeliharaan senjata api <p>b. Awak kapal</p> <ul style="list-style-type: none">- peningkatan kuantitas dan kualitas petugas dibidang awak kapal penjagaan laut dan pantai- penyiapan rencana, program kerja dan laporan					